



B.
582001

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- ing : barwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.
- ngat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/-Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

MENGETAHUI

TELAH DIPERIKSA DAN DITELITI
SESUAI DENGAN ASLINYA

Kd. 8.914/10.00/68/2016
24-08-2016



LA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA BANDUNG

HI. SARADEN, MH
NIP. 196403071994031001

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

- etapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.
- tama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- dua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- tiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- empat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- lima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- enam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



TARMIZI TAHER

mbusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

NO	PROVINSI	DAERAH	NO	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	
8	Lampung		104	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ulak Pandan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Tanjung Agung Kec. Kaur Selatan	Kodya Bengkulu Selatan
			105	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sinar Semendo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Sinar Semendo Ds. Sinar Semendo Kel. Labuhan Dalam Kec. Kedaton Kodya Bandar Lampung	Kodya Bandar Lampung
			106	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kota Baru	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Kota Baru Jl. Mayjen Satriyo No. 50 Kel. Kotabaru Kec. Tanjung Karang Timur Kodya Bandar Lampung	Kodya Bandar Lampung
			107	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Braja Sakti Way Jepara	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Braja Sakti Way Jepara Kab. Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah
			108	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cibubur	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cijantung Filial di Cibubur Jl. Bulak Serih Rt. 005/10 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kodya Jakarta Timur	Kodya Jakarta Timur
			109	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pegadungan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karni Filial di Pegadungan Jl. Madrasah Rt. 003/04 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Kodya Jakarta Barat	Kodya Jakarta Barat
			110	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pondok Pinang	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Petungkian Selatan Filial di Pondok Pinang Jl. Pupat Rt. 5/8 No. 3 A Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Kodya Jakarta selatan	Kodya Jakarta Selatan
			111	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kebonan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial di Kel. Kebonan Kec. Karanggede Kab. Boyolali	Kab. Boyolali
			112	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Melikan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Rongkop di Ds. Melikan Kec. Rongkop Kab. Gunung Kidul	Kab. Gunung Kidul
			113	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Janti	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Lengkong Jl. Mayjen Panjaitan Ds. Janti Kec. Slahung Kab. Ponorogo	Kab. Ponorogo
			114	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bangunrejo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Filial Bogem Ds. Bangunrejo Kec. Sukceto Kab. Ponorogo	Kab. Ponorogo

8 Lampung

MENGETAHUI

TELAH DIPERIKSA DAN DITELITI

BESERTA DENGAN ASLINYA

NOMOR

11.08.91/10.00/68/106

24-08-2016

KEMENTERIAN AGAMA

KOTA BANDAR LAMPUNG



NO	PROVINSI	URUT MAD.	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB/KOTA	KET.
		48	2 Madrasah Aliyah Negeri 3 Sumbawa	Madrasah Aliyah Swasta Al Iqro Empang Jl. Merdeka Kec. Empang Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa	
		49	3 Madrasah Aliyah Negeri 3 Bima	Madrasah Aliyah Swasta Sila Ds. Rato Sila Kec. Bolo Kab. Bima	Kab. Bima	
20 Nusa Tenggara Timur		50	1 Madrasah Aliyah Negeri Kalahahi	Madrasah Aliyah Swasta Kalahahi Kab. Alor	Kab. Alor	
		51	2 Madrasah Aliyah Negeri Kedang	Madrasah Aliyah Swasta Uyelewun Kalikur Kedang, Lembata Kab. Flores Timur	Kab. Flores Timur	
20 Maluku		52	1 Madrasah Aliyah Negeri Gurabati	Madrasah Aliyah Swasta Gurabati Kel. Gurabati Kec. Tidore Kab. Halmahera Tengah	Kab. Halmahera Tengah	
		53	2 Madrasah Aliyah Negeri Geser	Madrasah Aliyah Swasta Geser Kel Geser Kec. Seram Timur Kab. Maluku Tengah	Kab. Maluku Tengah	

Ditetapkan di Jakarta

Kedua Tanggal 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



DR. TARIQI TAHER



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 17 (Tujuh Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 24 (Dua Puluh Empat) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 49 (Empat Puluh Sembilan) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

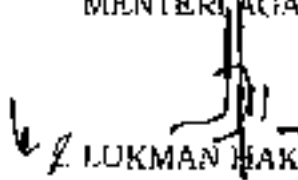
KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


/ LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 389 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 17 (TUJUH BELAS)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MAN 1 (Model) Tanjung Karang	MAN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MAN 2 Tanjung Karang	MAN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MAN 2 Metro	MAN 1 Metro
4	Lampung	MAN Kalianda	MAN 1 Lampung Selatan
5	Lampung	MAN Puncowati	MAN 1 Lampung Tengah
6	Lampung	MAN Kotabumi	MAN 1 Lampung Utara
7	Lampung	MAN Padangratu	MAN 2 Lampung Utara
8	Lampung	MAN Krui	MAN 1 Pesisir Barat
9	Lampung	MAN Liwa	MAN 1 Lampung Barat
10	Lampung	MAN Kotaagung	MAN 1 Tanggamus
11	Lampung	MAN 1 Metro	MAN 1 Lampung Timur
12	Lampung	MAN Banjarnegara	MAN 1 Way Kanan
13	Lampung	MAN Kedondong	MAN 1 Pesawaran
14	Lampung	MAN Pringswu	MAN 1 Pringswu
15	Lampung	MAN Mulyakencana	MAN 1 Tulang Bawang Barat
16	Lampung	MAN Kilang Budi Jaya	MAN 2 Tulang Bawang Barat
17	Lampung	MAN Simpang Pematang	MAN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 369 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 24 (DUA PULUH EMPAT)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MTsN 1 Tanjungkarang	MTsN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MTsN 2 Tanjungkarang	MTsN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MTsN Kalianda	MTsN 1 Lampung Selatan
4	Lampung	MTsN Palas	MTsN 2 Lampung Selatan
5	Lampung	MTsN Sidoharjo	MTsN 3 Lampung Selatan
6	Lampung	MTsN Banjarsari	MTsN 4 Lampung Selatan
7	Lampung	MTsN Poncowati	MTsN 1 Lampung Tengah
8	Lampung	MTsN Bandar Surabaya	MTsN 2 Lampung Tengah
9	Lampung	MTsN 1 Kotabumi	MTsN 1 Lampung Tengah
10	Lampung	MTsN 2 Kotabumi	MTsN 2 Lampung Tengah
11	Lampung	MTsN Padang Ratu	MTsN 3 Lampung Tengah
12	Lampung	MTsN Liwa	MTsN 1 Lampung Barat
13	Lampung	MTsN Menggala	MTsN Tulang Bawang
14	Lampung	MTsN Kotaagung	MTsN 1 Tanggamus
15	Lampung	MTsN Model Talangpadang	MTsN 2 Tanggamus
16	Lampung	MTsN Metro Batanghari	MTsN 1 Lampung Timur
17	Lampung	MTsN Raman Utara	MTsN 2 Lampung Timur
18	Lampung	MTsN Kasui	MTsN 1 Way Kanan
19	Lampung	MTsN Scrupa Indah	MTsN 2 Way Kanan
20	Lampung	MTsN Kedondong	MTsN 1 Pesawaran
21	Lampung	MTsN Gunungrejo	MTsN 2 Pesawaran

22. Lampung ...

22	Lampung	MTsN Pringsewu	MTsN 1 Pringsewu
23	Lampung	MTsN Sukoharjo	MTsN 2 Pringsewu
24	Lampung	MTsN Seri Tanjung Mesuji	MTsN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


 LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 365 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI LAMPUNG

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 49 (EMPAT PULUH SEMBILAN)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Lampung	MIN 1 Tanjung Karang	MIN 1 Bandar Lampung
2	Lampung	MIN 1 Teluk Betung	MIN 2 Bandar Lampung
3	Lampung	MIN Tanjung Agung	MIN 3 Bandar Lampung
4	Lampung	MIN Sawah Brebes	MIN 4 Bandar Lampung
5	Lampung	MIN Sukarame	MIN 5 Bandar Lampung
6	Lampung	MIN Way Halim	MIN 6 Bandar Lampung
7	Lampung	MIN Jagabaya II	MIN 7 Bandar Lampung
8	Lampung	MIN Panjang	MIN 8 Bandar Lampung
9	Lampung	MIN Sukajawa	MIN 9 Bandar Lampung
10	Lampung	MIN Kota Baru	MIN 10 Bandar Lampung
11	Lampung	MIN Sinar Semendo	MIN 11 Bandar Lampung
12	Lampung	MIN Garuntang	MIN 12 Bandar Lampung
13	Lampung	MIN Model Kalianda	MIN 1 Lampung Selatan
14	Lampung	MIN Sukanegara Tanjung Bintang	MIN 2 Lampung Selatan
15	Lampung	MIN Srimulyo Natar	MIN 3 Lampung Selatan
16	Lampung	MIN Sidomulyo	MIN 4 Lampung Selatan
17	Lampung	MIN Rajabasa	MIN 5 Lampung Selatan
18	Lampung	MIN Ulum Sukamaju	MIN 6 Lampung Selatan

19. Lampung . .

19	Lampung	MIN 1 Kotabumi	MIN 1 Lampung Utara
20	Lampung	MIN 2 Kotabumi	MIN 2 Lampung Utara
21	Lampung	MIN 3 Kotabumi	MIN 3 Lampung Utara
22	Lampung	MIN 4 Kotabumi	MIN 4 Lampung Utara
23	Lampung	MIN Blambangan Pagar	MIN 5 Lampung Utara
24	Lampung	MIN Padang Ratu	MIN 6 Lampung Utara
25	Lampung	MIN Bernah	MIN 7 Lampung Utara
26	Lampung	MIN 1 Kria	MIN 1 Pesisir Barat
27	Lampung	MIN 2 Tanjung Raya	MIN 1 Lampung Barat
28	Lampung	MIN 3 Watas	MIN 2 Lampung Barat
29	Lampung	MIN Hujung	MIN 3 Lampung Barat
30	Lampung	MIN Menggala	MIN 1 Tulang Bawang
31	Lampung	MIN Pasar Batang	MIN 2 Tulang Bawang
32	Lampung	MIN Kotaagung	MIN 1 Tanggamus
33	Lampung	MIN Purwodadi	MIN 2 Tanggamus
34	Lampung	MIN Adirejo	MIN 1 Lampung Timur
35	Lampung	MIN Sukadana	MIN 2 Lampung Timur
36	Lampung	MIN Gunung Terang	MIN 3 Lampung Timur
37	Lampung	MIN Braja Sakti	MIN 4 Lampung Timur
38	Lampung	MIN Blambangan Umpu	MIN 1 Way Kanan
39	Lampung	MIN Simpang Asam	MIN 2 Way Kanan
40	Lampung	MIN Tegal Mukti	MIN 3 Way Kanan
41	Lampung	MIN Sritunggal	MIN 4 Way Kanan
42	Lampung	MIN Model Pasar Baru	MIN 1 Pesawaran
43	Lampung	MIN Negara Saka	MIN 2 Pesawaran
44	Lampung	MIN Pringsewu	MIN 1 Pringsewu
45	Lampung	MIN Model Bandungbaru	MIN 2 Pringsewu
46	Lampung	MIN Guraikmas	MIN 3 Pringsewu

47. Lampung ...

47	Lampung	MIN Pamenang	MIN 4 Pringsewu
48	Lampung	MIN Brebes	MIN 1 Tulang Bawang Barat
49	Lampung	MIN Mukti Karya	MIN 1 Mesuji

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN